

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar mereka saling tolong menolong tukar menukar kebutuhan dan keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bercocok tanam atau dalam hal yang lain, baik kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan atau kemanfaatan umum dan kepentingan bersama.<sup>1</sup> Oleh karena itu hukum Islam mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat dengan jalan yang adil, agar manusia melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan.<sup>2</sup>

Dalam buku Hukum Ekonomi Syariah karangan Abdul Manan, bahwasannya Fiqih Muamalah adalah aktivitas seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing dan secara etimologi sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, kerjasama dagang, perserikatan/perkongasian, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sayid Sabiq, *fiqh sunnah, jilid II*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987). Hlm.19.

<sup>2</sup> Nazar Bakriy, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994) hlm.57

Dalam kehidupan sehari-hari futsal adalah cabang olah raga menjadi salah satu jawaban atas sempitnya lahan bermain di daerah perkotaan. Saat ini banyak lahan kosong dan lapangan olahraga lain yang berubah menjadi lapangan futsal. Lapangan itu tidak hanya dimiliki oleh Pemda melalui gedung-gedung olahraga (GOR), tapi makin hari makin banyak pula pengusaha yang mencoba terjun ke bisnis ini. Ini juga adalah salah satu jawaban untuk pengusaha-pengusaha baru yang ingin mencoba menekuni bisnis yang sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi orang lain. Namun banyak orang ingin bermain futsal tetapi terkendala oleh tempat yang layak dalam menjamin kenyamanan dan keselamatannya. Maka dari itu ada hal kelayakan dalam lapangan yang dipergunakan. Seperti halnya ukuran panjang dan lebar lapangan, rumput yang dipergunakan, bola dan semua yang bersangkutan ada aturannya tersendiri.

Dalam Islam juga diatur tata cara sewa menyewa atau *Ijarah*. Menurut syara', *al ijarah*, ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pernggatian.<sup>4</sup> Sewa menyewa adalah perpindahan hak milik atau pengambilan manfaat atas suatu barang, perpindahan hak milik tanah ini dibolehkan oleh syariat Islam, asal tidak melanggar yang telah ada, atau tidak ada dalil yang melarangnya prinsip saling merelakan telah ada dalam akad sewa tanah ini, saat pemilik tanah dan penggarap melakukan transaksi (akad), meskipun diantara pemilik tanah dan penggarap telah saling merelakan tetapi rukun dan syaratnya tidak dilaksanakan dengan benar maka sewa tanah tersebut dapat dikatakan batal

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 13*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hlm. 7

atau tidak sah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Karna apabila hal seperti ini dipaksakan akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Contohnya seperti pihak-pihak yang bertransaksi itu orang yang belum baligh atau tidak melakukan *ijab* dan *qabul* yang benar, atau barang yang disewakan itu tidak bisa diproduksi atau tidak bisa dimanfaatkan oleh penggarap.

Dalam KUHPdata pasal 1548 bahwasannya sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diriya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.<sup>5</sup>

Perjanjian sewa menyewa mempunyai peranan sangat penting, di samping perjanjian jual beli dalam sektor dunia usaha, sejak zaman dahulu hingga kini. Betapa kesulitan akan timbul dalam kehidupan sehari-hari seandainya sewa-menyewa ini tidak dibenarkan oleh hukum. Karena itu, sewa menyewa dibolehkan dengan keterangan syarat yang amat jelas dan merupakan manifestasi dari keluesan dan respon Islam terhadap realitas hidup dan setiap orang mendapatkan hak untuk melakukan sewa-menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat Islam.

Dalam penelitian ini penyusun lebih memfokuskan untuk membahas tentang bagaimana mekanisme sewa menyewa *urbun* dengan studi kasus lapangan futsal Zone 73 di Cipadung Kota Bandung. Dalam penggunaan lapangan futsal harus ada sebuah transaksi akad untuk mempergunakanya. Aturan tersebut ialah sewa menyewa untuk dapat menikmati fasilitas yang ada. Sewa menyewa itu

---

<sup>5</sup>Subekti dan Tjitrosudibjo, *KUHPdata*, (Jakarta: PT Pradnya Pramita, 2004), hlm.381

sendiri adalah perjanjian dimana yang menyanggupi menyerahkan benda untuk dipakai selama waktu yang ditentukan dan pihak lain menyanggupi membayar harga ditetapkan untuk dipakai pada ketentuan yang telah diatur.

Sebuah fenomena yang menarik penyusun temui dari pengamatan terhadap kegiatan sewa menyewa atau *ijarah* pada lapangan futsal Zone 73 di Cipadung Kota Bandung. Pada kasus ini menariknya adalah penerapan sistem panjar dalam praktek penyewaan lapangan futsal tersebut, bahwa ketika seseorang menyewa dan melakukan pembatalan maka diberikan sangsi atau denda sebesar dari uang muka yang telah disepakati. Sebagai perumpamaan sewa lapangan RP. 125.000,- besar uang muka/jaminan RP. 50.000,- dan ketika pembatalan terjadi maka uang muka tersebut akan hangus.

Adapun lapangan futsal zone 73 Cipadung Bandung adalah salah satu tempat menyewa lapangan futsal yang menerapkan sewa menyewa dengan sistem panjar atau uang muka. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP SISTEM PANJAR DALAM SEWA-MENYEWA LAPANGAN FUTSAL ZONE 73 DI CIPADUNG KOTA BANDUNG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang ada di atas mengenai pelaksanaan pembayaran panjar dalam sewa menyewa lapangan futsal Zone73 di kelurahan cipadung kota bandung

1. Bagaimana pelaksanaan sistem panjar dalam sewa menyewa di lapangan futsal ZONE 73 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru, Kota Bandung?
2. Bagaimana pandangan hukum Ekonomi Islam terhadap praktik sistem panjar pada sewa-menyewa Lapangan Futsal ZONE 73 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru, Kota Bandung?

### **C. Tujuan penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan praktik sistem panjar dalam sewa menyewa lapangan futsal ZONE 73 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
2. Untuk Menjelaskan pandangan hukum ekonomi Islam terkait praktik sistem panjar pada sewa menyewa lapangan futsal ZONE 73 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan dari penelien antara lain:

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran, khususnya pada sewa-menyewa yang menggunakan sistem panjar.

2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan, sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang suka dengan sewa menyewa agar memperhatikan perjanjian sehingga tidak dirugikan.

## E. Kerangka Pemikiran

Syariat Islam menganjurkan manusia untuk mengadakan sewa menyewa (*ijarah*), karena sudah menjadi keperluan manusia tidak semua orang memiliki sesuatu barang/benda yang ia perlukan. Sewa menyewa adalah perjanjian dimana yang menyanggupi menyerahkan benda untuk dipakai selama waktu yang sudah ditentukan dan dari satu pihak membayar harga sewa yang telah disepakati bersama serta mematuhi tata tertib yang telah diatur bersama

Sewa menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Swt agar dalam melakukan kegiatan muamalat jangan sampai memakan harta sesama secara batil. Sewa menyewa harus disetujui antara dua belah pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad.

Sebagaimana Firman Allah dalam An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pertama: Rukun dan Syarat Ijarah:

1. *Sighat Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak); terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/ pengguna jasa.
3. Obyek akad Ijarah, yaitu:
4. Manfaat barang dan sewa; atau
5. Manfaat jasa upah.

Kedua: Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktu bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau indifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah suatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS (Lebaga Keuangan Syari'ah) sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga kewajiban LKS dan Nasabah dalam pembayaran *Ijarah*:

Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang dan jasa;

1. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
2. Menanggung biaya pembiayaan barang
3. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan

Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

1. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga kebutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad(kontrak)
2. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan(tidak materil)
3. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitasi Syari'ah setelah tidak ditemui kesepakatan melalui musyawarah.

ditetapkan di Jakarta Tanggal 08 Muharram 1421 H/13 April 2000 M

Perjanjian di mana yang menyanggupi menyerahkan benda untuk dipakai selama waktu tertentu dan pihak lain menyanggupi membayar harga yang ditetapkan untuk dipakai pada ketentuan yang telah diatur. Kitab undang-undang hukum perdata membuat ketentuan sewa-menyewa di mana seseorang bersedia



memberi manfaat suatu benda terhadap orang lain dengan pembayaran yang disanggupi pihak tersebut.

Selain itu, dalam prakteknya sewa-menyewa akan dianggap sah jika syarat dan rukun yang ditentukan terpenuhi. Syarat akad dalam sewa-menyewa yaitu: baligh dan berakal, saling menyatakan kerelaannya dalam berkata, manfaat objek sewa menyewa harus diketahui dan jelas, objek sewa harus tidak cacat, dihalalkan dan bukan kewajiban penyewa, adanya prinsip kerelaan sangat penting dalam sewa menyewa, hal tersebut dikarenakan akan mempengaruhi dalam menentukan sah atau tidaknya dalam sewa menyewa tersebut. Kerugian yang ditanggung sebelah pihak akan menimbulkan ketidakadilan. Sewa menyewa atau *ijarah* yaitu perjanjian mengambil manfaat dengan kontrak. Dalam penelitian saya bahwasanya *ijarah* sewa menyewa terhadap sistem panjar di zone 73 bahwa uang muka yang telah dibayarkan jika terjadi pembatalan akad maka uang muka tersebut tidak bisa di kembalikan sedangkan *Ijarah* menurut ulama hanafiyah adalah akad lazim ( mengikat ),maka haruslah ada suatu alasan atau ujah dalam pembatalan akad *ijarah*. Uang muka dalam fiqih muamalah sering dikenal dengan “ *urbun* atau ‘ *urban*.”Yang berarti meminjamkan dan memajukan.<sup>19</sup> Secara etimologis “ *urbun*” berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli.<sup>20</sup>

لِذَا وَعِىِئِلَٰللهِ رَلَامِ حَوِىِ

Maksud dari ayat di atas adalah segala bentuk jual beli itu halal hukumnya, kecuali yang terdapat unsur riba. Mengenai ada tidaknya riba dalam jual beli dan

sewa menyewa dengan uang panjar, terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama.

Pendapat yang melarang jual beli dan sewa menyewa dengan uang panjar didasarkan adanya pertimbangan bahwa jual beli dan sewa menyewa seperti ini terdapat syarat yang merusak suatu perjanjian yaitu:

1. *Fasad* (rusak)
2. *Gharar* (ketidakjelasan)
3. Adanya unsur riba karena memakan harta orang lain dengan cara batil.

Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak. *Gharar* merupakan suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, hak objek itu ada atau tidak.

Sedangkan pendapat yang memperbolehkan jual beli dan sewa menyewa dengan uang panjar berargumen bahwa uang panjar merupakan kompensasi yang diberikan kepada penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama waktu tertentu .

Dengan kata lain bahwa ketentuan dan keabsahan material yang disewa dan menyewakan dalam Islam yaitu:

1. Barang yang disewakan harus ada, oleh karena itu tidak sah sewa menyewa barang yang tidak ada atau yang dikhawatirkan tidak ada.
2. Barang yang disewa harus *mal mutaqawim*. *Mal mutaqawim* yaitu setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam ikhtiyar.

3. Barang yang disewakan harus barang yang sudah dimiliki.

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan muamalah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya seperti dalam kaidah fiqh. Prinsip Ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam Muamalat dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja yang sesuai dengan yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan nilai dan nilai agama.

- Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa sedikit mengandung unsur-unsur paksaan. Unsur suka-rela pada setiap akad dalam muamalat sangatlah penting sebab tanpa mengandung unsur paksaan antara kedua belah pihak. Unsur paksaan itulah yang nantinya akan mengakibatkan perjanjian (akad) menjadi tidak sah atau batal.
- Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan yang manfaat dan menghindarkan madarat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam prinsip muamalat ini dimaksudkan bahwa akad muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup.
- Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menjauhi unsur-unsur penganiayaan, dalam unsur-unsur pengambilan kesempatan

dalam kesempitan. Prinsip muamalat ketentuan bahwa segala bentuk muamalat adalah boleh kecuali telah ditentukan oleh al-Quran dan sunnah.

Sewa menyewa dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syarat-syarat akad dalam sewa menyewa yaitu kedua pihak yang akan berangkat baligh dan berakal saling menyatakan kerelaan dalam berakad; gerakan manfaat obyek sewa-menyewa harus diketahui sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari; Objek sewa-menyewa tidak bercacat; dihalalkan dan bukan kewajiban bagi penyewa. rasa suka sama suka dan prinsip kerelaan penting sebab menentukan sah dan tidak akad yang dilakukan dalam sewa menyewa dilakukan dalam sewa menyewa. Kerugian yang di tanggung salah satu pihak akan menimbulkan ketidak adilan.

Sewa menyewa atau ijarah yaitu perjanjian mengambil manfaat dengan kontrak. Sesuatu yang dikontrak dapat berupa benda atau barang (al-Ayan) seperti tanah (al-arad), hewan tunggangan (al-Dawab) atau berupa jasa atau pemburuan (al-Amal).

Para ulama memberikan pendapat, terkait dengan hukum jual beli urbun, yaitu sebagai berikut:

- Ulama madzhab Hambali berpendapat: jual beli urbun hukumnya boleh, namun harus ditentukan batas waktu khiyar (pilihan apakah jual beli jadi atautidak jadi) bagi pembeli. Karena jika tidak ditentukan, maka tidak ada kepastian sampai kapan penjual harus menunggu.

- Sedangkan Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa bahwa jual beli urbun hukumnya fasid (rusak), namun akad transaksi jual belinya tidak batal.
- Jumhur ulama berpendapat, bahwa jual beli urbun adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah, berdasarkan larangan Nabi SAW atas jual beli ini, dan juga karena urbun mengandung unsur gharar, spekulasi, dan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Termasuk yang mengemukakan pendapat seperti ini adalah Imam Syaukani dalam Nailul Authar-Nya.

Dilarangnya jual beli urbun adalah sebagai berikut:

- Adanya unsur gharar, yaitu umumnya terjadi pada dua hal yaitu,
- Ketidakjelasan, apakah pembeli jadi membeli barangnya atau tidak
- Ketidakjelasan, dalam jangka waktu kepastian, jadi atau tidaknya pembeli akan membeli atau membatalkannya.
- Adanya unsur maisir (spekulasi), yaitu oleh karena adanya unsur gharar atau ketidakjelasan dari pembeli, maka dengan sendirinya muncul maisir (spekulasi) sehingga ia tidak menjualnya kepada orang lain. Padahal calon pembeli belum tentu membeli.
- Mengambil harta orang lain tanpa imbalan (batil), yaitu dalam hal ketika pembeli tidak jadi membeli, maka uang muka yang memang sejak awal dimaksudkan sebagai alat bayar, akan berpindah kepemilikannya menjadi milik si penjual tanpa ada kompensasi apapun buat si pembeli.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Dalam menentukan metode penelitian yang digunakan, penentuan metode disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, dan kerangka berpikir. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, yakni mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Menurut Cik Hasan Bisri (2003:57) tipe penelitian seperti ini merupakan metode yang memusatkan diri pada pemecahan-pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk bilangan. Data ini bersumber pada hasil pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan.

- a. Data tentang mekanisme sewa menyewa dengan sistem panjar di lapangan futsal ZONE 73 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- b. Data tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sewa menyewa dengan sistem panjar di lapangan futsal ZONE 73 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian yang dilakukan terdiri dari :

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang bersangkutan yaitu Bapak Zulhamli sebagai pihak pengelola ZONE 73.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data penunjang yang berkaitan dengan penelitian seperti referensi buku, jurnal/makalah, skripsi, artikel, catatan perkuliahan, internet, dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu tahap pengumpulan data dengan cara terjun langsung dengan informan.
- b. Wawancara, yaitu merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan pihak pegawai di tempat lapangan futsal ZONE 73 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- c. Studi Kepustakaan yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan inti permasalahan yang diteliti yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan kedudukan hukum Ekonomi Islam terhadap akad sewa menyewa dengan sistem panjar di lapangan futsal ZONE 73 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

#### 5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari observasi dan wawancara, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.

